

Tipologi Komunikasi Politik Ulama Jawa dan Madura: Perbandingan Orientasi Nilai Kebangsaan dan Keagamaan (1998-2024)

Adhea Putri Mayla Al Khozi^{1*}, Nurul Azizah², Alfiatuz Zahra Firdaus³

¹Universitas Ibrahimy, Indonesia

²Universitas Ibrahimy, Indonesia

³Universitas Ibrahimy, Indonesia

*Corresponding Author: putriadhea46@gmail.com

Article History

Received: 23 December 2025

Revised: 30 Mei 2026

Accepted: 2 Juni 2026

Published: 30 June 2026

Keywords

political communication; typology; Javanese ulama, Madurese ulama

Kata Kunci

komunikasi politik; tipologi; ulama Jawa; ulama Madura

ABSTRACT

The political communication of ulama (Islamic scholars) in Indonesia reflects diverse patterns shaped by culture, religious tradition, and social context. This study examines differences in the political communication of Javanese and Madurese ulama on the national stage during the post-reform era (1998–2024) using a qualitative-comparative approach grounded in the sociology of political communication and Islamic politics. Data were collected through in-depth interviews with 10–12 core informants (ulama, senior santri, NU activists, and pesantren academics), documentation review, and social media observation. Findings reveal that Javanese ulama tend toward participatory-inclusive communication, viewing politics as a space for social da'wah, while Madurese ulama demonstrate moralistic-protective communication, maintaining distance from practical politics to preserve religious authority. These differences are not merely personal but are structurally rooted in local culture, theological perspectives, and historical experience. This study enriches theories of religious political communication in Indonesia by positioning local culture as a structural variable rather than mere background

ABSTRAK

Komunikasi politik ulama di Indonesia menampilkan ragam wajah yang dipengaruhi oleh kultur, tradisi keagamaan, dan konstruksi sosial yang melingkupinya. Penelitian ini mengkaji perbedaan pola komunikasi politik antara ulama Jawa dan ulama Madura dalam panggung nasional selama periode pasca-reformasi (1998–2024) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif berbasis sosiologi komunikasi dan politik Islam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10–12 informan inti (ulama, santri senior, aktivis NU, dan akademisi pesantren), studi dokumentasi, dan observasi media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Jawa cenderung menampilkan komunikasi partisipatif-inklusif, memandang

Read Online:

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialektika/article/view/12914>

Doi:

<https://doi.org/10.21154/dialektika.v3i1.12914>

politik sebagai ruang dakwah sosial, sedangkan ulama Madura menampilkan komunikasi moralistik-protektif, menjaga jarak dari politik praktis untuk mempertahankan wibawa keagamaan. Perbedaan ini tidak bersifat personal, melainkan berakar pada faktor struktural: kultur lokal, pandangan teologis, dan pengalaman historis masing-masing tradisi. Penelitian ini memperkaya teori komunikasi politik keagamaan di Indonesia dengan menempatkan kultur lokal sebagai variabel struktural, bukan sekadar latar belakang.

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, ulama selalu menempati posisi yang istimewa, bukan semata karena ilmu agamanya, tetapi karena otoritas moral dan sosial yang mereka miliki. Dalam masyarakat muslim, ulama bukan hanya penafsir teks, tetapi juga penjaga kesadaran moral kolektif. Ulama juga bukan sekadar penyampai dakwah, tetapi juga mediator antara langit wahyu dan bumi manusia. Pasca reformasi 1998, peran agama dan ulama dalam politik Indonesia kian menonjol. Demokrasi yang lebih terbuka memberi ruang luas bagi ulama untuk tampil di ruang public, tidak hanya sebagai penasihat moral, tetapi juga sebagai aktor politik langsung yang terlibat dalam kampanye, menjadi juru bicara partai, atau bahkan menduduki jabatan politik (Miller, 2022).

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan dari pelaku politik kepada masyarakat. Komunikasi politik dapat dilakukan secara tersurat maupun tersirat yang bersifat serba hadir dimana dan kapan saja (Eliva & Zulaeha, 2017). Banyak studi menegaskan bahwa ulama memainkan peran sentral dalam politik Indonesia melalui komunikasi mereka yang memengaruhi opini publik dan dinamika demokrasi. Namun, penelusuran mendalam terhadap literatur menunjukkan tidak ada analisis komparatif yang sistematis antara pola komunikasi politik ulama Jawa dan Madura dalam konteks nasional, meskipun keduanya berbasis Nahdlatul Ulama (NU). Kesenjangan ini muncul karena kajian sebelumnya terfokus pada fenomena local, seperti kiai NU di Jawa Timur atau pesantren Madura, tanpa membingkai ulama sebagai aktor nasional yang membentuk dan dibentuk politik nasional.

Studi tentang ulama Jawa menyoroti keterlibatan aktif mereka, seperti pemanfaatan jaringan pesantren untuk mobilisasi politik, sebagaimana terlihat pada figur KH. Hasyim Asy'ari hingga KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebaliknya, penelitian mengenai ulama Madura banyak menekankan kehati-hatian mereka terhadap politik praktis, dengan contoh KH. Azaim Ibrahimy yang melarang jamaahnya terlibat untuk menghindari fitnah (Pribadi, 2012). Literatur ini umumnya memperlakukan kultur lokal sebagai latar belakang, bukan faktor struktural pembentuk strategi komunikasi.

Kesenjangan ini menimbulkan persoalan metodologis dan konseptual yang perlu dijawab. Dengan pendekatan komparatif lintas kultur, penelitian ini menempatkan ulama Jawa dan ulama Madura dalam konteks komunikasi politik nasional selama periode pasca-reformasi (1998–2024). Kebaruan penelitian ini terletak pada kerangka analisisnya, yaitu menjadikan kultur lokal dan tradisi dakwah bukan sebagai variabel tambahan, tetapi sebagai faktor struktural dalam dinamika komunikasi ulama. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya teori komunikasi politik keagamaan di Indonesia melalui lensa yang lebih kontekstual dan historis.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi pola pesan, medium, gaya retorik, dan strategi komunikasi ulama Jawa dalam politik nasional; (2) menemukan pola komunikatif dan strategi simbolik ulama Madura dalam hubungannya dengan politik nasional; (3) menganalisis perbedaan strategis di antara keduanya serta faktor penyebabnya, yakni kultur, sejarah, dan teologi lokal; dan (4) menelaah bagaimana basis jamaah menafsirkan komunikasi politik para ulama tersebut — apakah memperkuat atau justru menegosiasi ulang legitimasi keagamaan mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan basis analisis sosiologi komunikasi politik dan politik Islam. Pendekatan ini dipilih karena komunikasi politik ulama bukan sekadar praktik retorika, melainkan fenomena sosial yang sarat makna simbolik, termasuk bahasa tubuh, metafora, hingga keputusan diam (*silent communication*), yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan harus dipahami dalam konteks nilai, sejarah, dan relasi kekuasaan yang berakar pada kultur.

Secara teoretis, kerangka penelitian ini bertumpu pada dua landasan disiplin. Pertama, sosiologi komunikasi politik yang menempatkan komunikasi sebagai proses sosial, pesan politik dibentuk, dimaknai, dan disebarkan dalam konteks struktur budaya tertentu (Mcnaire, 2017). Kedua, studi politik Islam yang memandang ulama bukan hanya sebagai penjaga agama, tetapi juga sebagai elite moral (*moral elites*) yang memiliki modal simbolik dan legitimasi sosial dalam ruang politik (Bayat, 2010). Dua kerangka ini dipadukan untuk menjelaskan bahwa komunikasi politik ulama adalah hasil interaksi antara nilai teologis, struktur sosial pesantren, dan pengalaman historis terhadap kekuasaan.

Subjek penelitian adalah ulama dan tokoh pesantren dari dua wilayah utama: Jawa dan Madura. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengaruh sosial-keagamaan dan keterlibatan mereka dalam wacana politik nasional. Kelompok ulama Jawa mencakup para kiai dengan basis pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dikenal aktif berinteraksi dengan dunia politik, seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. A. Mustofa Bisri (Gus Mus), KH. Said Aqil Siradj, dan KH. Yahya Cholil Staquf. Kelompok ulama Madura meliputi kiai dari empat kabupaten utama, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yang dikenal berhati-hati dalam menanggapi politik praktis, di antaranya KH. Azaim Ibrahimy (Sukorejo), KH. R. Badrus Sholeh, dan KH. Kholilurrahman.

Selain para ulama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yakni santri senior dan alumni pesantren (untuk memahami penerimaan jamaah terhadap pesan politik ulama) serta aktivis NU, wartawan lokal, dan akademisi pesantren (untuk menjelaskan konteks sosial dan politik komunikasi ulama). Keseluruhan informan berjumlah sekitar 10–12 orang, dengan komposisi 5–6 dari masing-masing wilayah. Penelitian ini menitikberatkan pada kedalaman makna, bukan keluasan populasi. Unit analisis utama bukan individu, melainkan pola komunikasi yang mereka representasikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (*indepth interview*) dilaksanakan secara semi-terstruktur, baik secara tatap muka maupun melalui platform digital, dengan panduan pertanyaan yang mencakup orientasi politik, gaya komunikasi, medium yang digunakan, dan alasan teologis di balik sikap politik. Setiap sesi wawancara direkam dan ditranskripsikan, kemudian dikonfirmasi kepada informan untuk menjamin akurasi. Kedua, studi dokumentasi dilakukan terhadap teks ceramah, fatwa, pernyataan publik, dan rekaman video ulama yang tersedia secara terbuka di media massa dan kanal digital pesantren. Ketiga, observasi media sosial dilakukan selama enam bulan terhadap akun-akun resmi dan tidak resmi yang diasosiasikan dengan figur-figur ulama yang menjadi subjek penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis tematik berbasis cultural discourse analysis. Proses analisis mencakup empat tahap, yaitu (1) transkripsi dan reduksi data wawancara dengan memilih segmen yang relevan dengan tema komunikasi politik; (2) pengkodean tematik untuk mengidentifikasi pola pesan, strategi retorik, pilihan medium, dan posisi terhadap kekuasaan; (3) perbandingan lintas kelompok antara pola ulama Jawa dan ulama Madura; dan (4) interpretasi teoretis dengan mengaitkan temuan pada kerangka sosiologi komunikasi dan konsep elite moral dalam studi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Komunikasi Politik Ulama Jawa: Partisipatif dan Inklusif

Dari hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi media, ulama Jawa, khususnya mereka yang berakar di lingkungan pesantren NU di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menunjukkan pola komunikasi politik yang terbuka, adaptif, dan partisipatif. Mereka memandang politik sebagai ruang dakwah sosial, sebuah wasilah (perantara) untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moral publik.

Dalam banyak ceramah dan tulisan yang berhasil didokumentasikan, istilah-istilah seperti *amar ma'ruf nahi munkar*, *kebangsaan*, dan *rahmatan lil-'alamin* digunakan sebagai bingkai moral bagi partisipasi politik (Mahfud, 2022: 231-60). Gus Dur, misalnya, kerap menggunakan humor dan narasi kebangsaan untuk menyampaikan kritik politik tanpa mengancam wibawa keulamaan. Gus Mus berbicara dengan kelembutan moral, tidak melalui instruksi, tetapi melalui keteladanan. KH. Yahya Cholil Staquf menampilkan komunikasi politik berbasis *reasoning religious* dengan mengedepankan argumentasi rasional yang bersandar pada nilai-nilai agama. Ketiga figur ini secara konsisten menggunakan media massa dan media sosial sebagai medium utama untuk memperluas jangkauan pesan mereka kepada publik nasional.

Dari 6 informan Jawa yang diwawancarai, kesemuanya menyatakan bahwa keterlibatan politik ulama adalah keniscayaan moral, bukan semata kepentingan pragmatis. Salah seorang santri senior alumni Pesantren Tebuireng menegaskan: "Bagi kami, kiai yang diam ketika negara salah arah justru meninggalkan amanah umat." Pernyataan ini mencerminkan konstruksi sosial bahwa partisipasi politik ulama Jawa dipahami sebagai perpanjangan dari tanggung jawab keagamaan, bukan penyimpangan dari kemurnian dakwah.

Pola Komunikasi Politik Ulama Madura: Moralistik dan Protektif

Sebaliknya, ulama Madura menampilkan pola komunikasi politik yang moralistik, konservatif, dan protektif. Politik bagi mereka bukan arena dakwah utama, melainkan wilayah rawan fitnah yang harus dijaga dengan kehati-hatian. Masyarakat Madura memiliki struktur sosial yang lebih hierarkis dan paternalistik, di mana kiai dipandang sebagai figur karismatik yang tidak hanya memimpin pesantren, tetapi juga menjaga moral kolektif masyarakat.

Dalam ceramah dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, sering muncul ungkapan seperti "politik itu bukan tempat bagi orang yang ingin selamat agamanya" atau "kiai itu pemimpin ruhani, bukan penguasa duniawi (Syahrin, 2024: 113-32). "KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy, misalnya, secara eksplisit melarang jamaahnya ikut politik praktis agar tidak memecah ukhuwah. Dalam sebuah rekaman pengajian umum yang beredar luas, beliau menyatakan bahwa menjaga persatuan umat lebih utama daripada memenangkan kontestasi politik. Alih-alih menyerukan partisipasi langsung, ulama Madura menekankan pesan moral dan etika publik. Medium yang dipilih pun berbeda: mereka cenderung menggunakan majelis lokal, pesan lisan, dan fatwa moral — bukan media sosial atau konferensi pers.

Dari 6 informan Madura yang diwawancarai, 5 di antaranya menegaskan bahwa kiai yang terlibat aktif dalam partai politik berisiko kehilangan kepercayaan jamaah. Seorang kiai muda dari Sumenep yang aktif di NU menyatakan: "Kami mendukung demokrasi, tapi bukan berarti kiai harus turun ke lapangan kampanye. Tugas kami menjaga nilai, bukan merebut kursi." Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa sikap menjauh dari politik praktis bukan cermin ketidakpedulian, melainkan strategi komunikasi simbolik untuk mempertahankan kesucian otoritas keagamaan.

Perbandingan Pola Komunikasi: Perbedaan Struktural dan Kesamaan Mendasar

Perbedaan mendasar antara kedua kelompok ulama dapat diringkas dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Perbandingan Pola Komunikasi Politik Ulama Jawa dan Madura

Aspek	Ulama Jawa	Ulama Madura
Orientasi Politik	Partisipatif (politik sebagai dakwah sosial)	Moralistik (politik sebagai potensi fitnah)
Gaya Komunikasi	Dialogis, nasionalis, humoris	Simbolik, tegas, paternalistik
Medium	Ceramah publik, media massa, media sosial	Majelis lokal, pesan lisan, fatwa moral
Relasi dengan Kekuasaan	Interaktif dan kritis	Selektif dan berhati-hati
Basis Legitimasi	Rasionalitas dan nilai kebangsaan	Kesalehan dan otoritas karismatik
Sikap terhadap Publik	Terbuka terhadap kritik	Protektif terhadap jamaah

Namun, di balik perbedaan itu, terdapat satu kesamaan mendasar, yaitu keduanya menganggap politik bukan tujuan, melainkan amanah moral. Perbedaan mereka terletak pada cara menjalankan amanah tersebut, ulama Jawa menjalankannya dari dalam sistem, sedangkan ulama Madura menjaganya dari luar.

Interpretasi Teoretis: Konteks Sosial-Kultural sebagai Struktur Komunikasi

Dari perspektif sosiologi komunikasi, pola komunikasi partisipatif ulama Jawa mencerminkan komunikasi berbasis konsensus, di mana pesan agama dikemas dalam bahasa kebangsaan untuk menjaga kohesi sosial (McNair, 2017). Hal ini berkorelasi dengan ekosistem sosial Jawa yang relatif plural dan terbuka, serta pengalaman historis NU yang kerap berinteraksi dengan kekuasaan, dari masa kolonial, Orde Baru, hingga reformasi. Jaringan pesantren, struktur sosial NU, dan tradisi musyawarah menjadikan ulama Jawa terbiasa bernegosiasi antara nilai agama dan realitas sosial.

Sebaliknya, dari perspektif politik Islam, pola komunikasi protektif ulama Madura menggambarkan politik resistif, ulama memilih menjaga jarak dari kekuasaan untuk mempertahankan otonomi moral (Eickelman, 2004). Sikap diam dalam konteks ini bukan pasifisme, melainkan strategi simbolik untuk mempertahankan kesucian otoritas keagamaan. Dengan meminjam konsep *cultural discourse* dari Eickelman, komunikasi politik ulama dapat dibaca sebagai wacana kultural tentang makna kekuasaan: bagi ulama Jawa, kekuasaan adalah sarana amar ma'ruf; bagi ulama Madura, kekuasaan adalah ujian bagi kemurnian niat.

Dengan demikian, dalam kerangka teori elite moral, ulama menempati posisi unik: mereka bukan politisi, tetapi tetap memiliki pengaruh politik karena otoritas moral yang

dimilikinya. Dua pola komunikasi yang ditemukan, partisipatif dan protektif, bukan merupakan kontradiksi, melainkan komplementaritas moral: dua strategi berbeda untuk menjaga agama di tengah arus dunia politik yang cair.

SIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi dua pola komunikasi politik ulama yang berbeda secara struktural namun saling melengkapi secara fungsional. Ulama Jawa menampilkan komunikasi partisipatif-inklusif dengan memandang politik sebagai madrasah sosial tempat nilai-nilai agama diterjemahkan ke dalam praksis kebangsaan. Ulama Madura menampilkan komunikasi moralistik-protektif dengan menjaga jarak dari politik praktis sebagai bentuk hirasah, yaitu penjagaan terhadap amanah spiritual umat.

Perbedaan kedua pola ini tidak bersifat personal, melainkan berakar pada faktor struktural berupa kultur lokal, pandangan teologis, dan pengalaman historis. Temuan ini menegaskan tiga proposisi konseptual. Pertama, komunikasi politik ulama adalah komunikasi moral, bukan semata strategi pengaruh; setiap tutur, isyarat, dan sikap diam seorang ulama adalah dakwah dengan pesan etis yang mengarahkan umat pada nilai. Kedua, kultur lokal bukan sekadar latar, melainkan struktur epistemologi komunikasi yaitu cara berbicara, memilih kata, dan berdiam diri semuanya diatur oleh nilai budaya setempat. Ketiga, paradigma kajian komunikasi politik keagamaan perlu diperluas agar tidak hanya menjelaskan "apa yang dikatakan ulama," tetapi juga "mengapa ia memilih untuk tidak mengatakan."

Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki dua model keulamaan politik yang saling melengkapi: ulama Jawa sebagai mediator sosial antara agama dan negara, dan ulama Madura sebagai penjaga moralitas masyarakat. Keduanya dibutuhkan untuk menggerakkan perubahan dan menjaga arah nilai. Keseimbangan ini mencerminkan pluralitas Islam Nusantara. Islam yang tumbuh dalam tanah budaya, berbicara dalam bahasa manusia, dan bergerak di antara teks dan konteks.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, keterbatasan representasi: hanya sebagian figur ulama yang dijadikan sampel, sehingga hasil penelitian bersifat konseptual dan representatif, bukan generalisasi kuantitatif. Kedua, keterbatasan temporal: pola komunikasi yang terbaca dapat bergeser seiring perubahan generasi dan situasi sosial-politik. Ketiga, observasi ranah digital belum sepenuhnya menguraikan logika algoritmik penyebaran pesan dakwah ulama di media sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi etnografi digital ulama di ruang publik daring, memperbandingkan ulama dari wilayah lain (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi), serta memberikan perhatian khusus pada peran dan retorika politik ulama perempuan (*nyai*) yang selama ini belum banyak dikaji dalam diskursus ilmiah. Pada tataran praksis, organisasi keagamaan seperti NU dapat mengembangkan pelatihan komunikasi berbasis maqāṣid al-syarī'ah agar politik menjadi instrumen maslahat, bukan alat permusuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayat, Asef. *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East*. Stanford University Press, 2010.
- Eickelman, Dale F. *Muslim Politics*. NJ: Princeton University Press, 2004.
- eliva, ida zulaeha ixsir. "model komunikasi politik ridwan kamil di media sosial instagaram." *DIALEKTIKA*, 2017, 205–23.

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika> | DOI:
10.15408/dialektika.v4i2.5540.

Mahfud, Choirul. "The Dynamics of Islam Nusantara: Historical Roots and Its Influence in Indonesian Islamic Discourse." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022): 231–60.

McNair, Brian. *An Introduction to Political Communication*. 6th ed. London: Routledge, 2017.

Miller, James. *Faith and Authority in Urban Islam: The Role of Ulama in Modernizing Societies*. 2022.

Syahrin, Harun. "Revisiting Ulama Authority in the Era of Digital Piety." *Asian Journal of Comparative Politics* 9, no. 1 (2024): 113–32.

Yanwar Pribadi. "Kiai in Madura: Their Roles in Local Politics in Indonesia." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 29:3, t.t.